



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung perancangan peraturan;
 - b. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
 - c. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor LKPP serta *Workshop/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)/Konsinyering* secara daring ataupun luring;
 - d. melakukan konsultasi rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat;
 - e. melakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal; dan
 - f. melakukan evaluasi proses dan hasil penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16
TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 175 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	1. Abdullah Azwar Anas 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa 4. Gatot Pambudhi Poetranto 5. Sutan Suangkupon Lubis 6. Setya Budi Arijanta	- - - - - -
2.	Ketua	Emin Adhy Muhaemin	-
3.	Anggota	1. Suharti 2. Gusmelinda Rahmi 3. Shahandra Hanitiyo 4. Hermawan 5. Raden Ari Widiyanto 6. Dwi Wahyuni Kartianingsih 7. Fadli Arif 8. Yulianto Prihhandoyo 9. Patria Susantosa 10. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 11. R. Fendy Dharma Saputra	- - - - - - - - - - -

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		12. Hardi Afriansyah	-
		13. Muhammad Aris Supriyanto	-
		14. Iwan Herniwan	-
		15. Jhon Piter Halomoan Situmorang	-
		16. Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
		17. Rinaldi Morintosh	-
		18. Edi Krisityanto	-
		19. Rusli Maryadi	-
		20. Antonius Lambok Sihombing	-
		21. Zulhenny	-
		22. Dwi Satrianto	-
		23. Mustika Rosalina Putri	-
		24. Fajar Adi Hemawan	-
		25. Januar Indra	-
		26. Ria Agustina Nasution	-
		27. Arif Rachman	-
		28. Muhammad Firdaus	-
		29. Selamat Budiharto	-
		30. Rasmita Juliana Sitepu	-
		31. Muhammad Naim	-
		32. Deasy Rachmawati	-
		33. Octo Army	-
		34. Ilvia Restu Utami	-
		35. Lailatul Mufarokhah	-
		36. Anita Carolin	-
		37. Gigih Pribadi	-
		38. Dara Kumala Arumbuana	-
		39. Hilman Fazri	-
		40. Sugianto	-
		41. Satriyo Wibowo	-
		42. Seno Haryo Wibowo	-
		43. Ade Rizky Emirsyah	-
		44. Imam Arumsyah	-
		45. Mira Erviana	-
		46. Febri Kamalisa Rachman	-

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		47. Ardian Hoppin Sitompul	-
		48. Benny Leopold Dumais	-
		49. Cherish Shery Desarya	-
		50. Asih Riska Nurmasari	-
		51. Cecep Suhendar	-
		52. Andy Purwa Sejati	-
		53. Fenita Enggraini	-
		54. Andi Darmawan	-
		55. Eva Sinaga	-
		56. Andi Rannualdi	-
		57. Annisa Putri	-
		58. Yasmine Permata Sari	-
		59. Fairuz Nawfal Hamid	-
		60. Dedi Setiawan	-
		61. Mega Chandra Sera	-
		62. Tri Angga Putra Pamungkas	-
		63. Paramitha Agdina Pusparini	-
		64. Bretty Rachayu Budiyanty	-
		65. Rini Handriyani	-
		66. Juniarty Erika Magdalena Saragi	-
		67. Mahatmya Widyasri	-
		68. Dini Lestari	-
		69. Anggraini Dwi Hapsari	-
		70. Wahyudi Wirja	-
		71. Dandy Darmawan	-
		72. Maharani Prima Wijayanti	-
		73. Akhmad Adi Purawan, Analis Hukum Madya, Asisten Deputi Perekonomian Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara	Rp500.000,00
		74. M. Zulfikar Ali, Kepala Bidang Perindustrian, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian	Rp500.000,00

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet	
		75. Achmad Zikrulah, Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Kementerian Keuangan	Rp500.000,00
		76. Tari Lestari, Koordinator Pembiayaan dan Analisis Moneter/Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas	Rp500.000,00
		77. Wasja, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri	Rp500.000,00
		78. Muhammad Zulfan Arief, Analis Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri	Rp500.000,00
		79. Herdiana, Koordinator Substansi Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis PBJ, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp500.000,00
		80. Rr. Sri Gadis Pari Bakti, Analis Kebijakan Pusat Industri Hijau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian	Rp500.000,00
		81. Arga Mahendra, Kepala Bagian Layanan Pengadaan/Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perindustrian	Rp500.000,00
		82. Marzuki Marnala Sinambela, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pusat	Rp500.000,00

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian	
		83. Zuni Ansarrifa, Kepala Subdit Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp500.000,00
		84. Agus Pudjijono, Kepala Subdit Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp500.000,00
		85. Monica Endang Hendrati, Ketua Tim Bidang Pendampingan dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan	Rp500.000,00
		86. Ruth Evelin Pasaribu, Analis Perdagangan Ahli Muda Kementerian Perdagangan	Rp500.000,00
		87. Agus Gendroyono, Pengurus Bidang II (Akreditasi dan Lisensi) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp500.000,00

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ